



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021**

**R-LPPD**





PEMKO DUMAI

## *K*ata Pengantar

*P*uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*S*esuai pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 RLPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

*T*entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adalah menjadi harapan kita semua, bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

Dumai, April 2022  
WALIKOTA DUMAI

*H. PAISAL, SKM, MARS*



PEMKO DUMAI

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	iv
<b>1. Capaian Kinerja Makro</b>	<b>1</b>
a. Indeks Pembangunan Manusia	1
b. Angka Kemiskinan	3
c. Angka pengangguran	6
d. Pertumbuhan Ekonomi	6
e. Pendapatan Per Kapita	11
f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	13
<b>2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar</b>	<b>16</b>
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)	16
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	38
<b>3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya</b>	<b>45</b>
<b>4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah</b>	<b>45</b>
<b>5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan</b>	<b>58</b>
<b>6. Inovasi Daerah</b>	<b>61</b>
<b>P E N U T U P</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

			<b>Hal</b>
Tabel	1	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020	1
Tabel	2	Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2020	2
Tabel	3	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau	3
Tabel	4	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020	5
Tabel	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (persen)	6
Tabel	6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah), 2016–2020	7
Tabel	7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2016–2020	8
Tabel	8	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2016–2020	9
Tabel	9	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2016–2020	10
Tabel	10	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020	12
Tabel	11	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019	13
Tabel	12	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021 Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2021 dan Perwako No. 49 Tahun 2021	46
Tabel	13	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021	46
Tabel	14	Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021	56
Tabel	15	Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021	58
Tabel	16	Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2021	59
Tabel	17	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	61



PEMKO DUMAI

## DAFTAR GRAFIK

			<b>Hal</b>
Grafik	1	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2020	1
Grafik	2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai	4
Grafik	3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020	5
Grafik	4	Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020	14



## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 1. Capaian Kinerja Makro

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

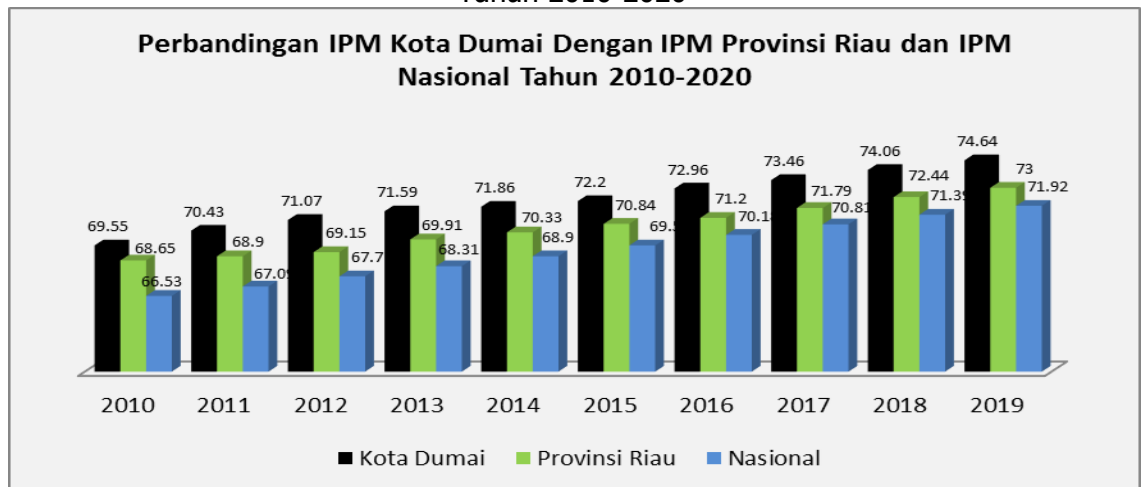
Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita.

Tabel. 1  
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional  
Tahun 2011-2020

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
Provinsi Riau	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,92

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Grafik. 1  
Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional  
Tahun 2010-2020



(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)



Selama periode 2011-2020 IPM Kota Dumai terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2011-2020, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2 dibawah. Pada tahun 2020, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan.

Tabel. 2  
Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau  
Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31
Indragiri Hulu	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83
Indragiri Hilir	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54
Pelalawan	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56
Siak	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68
Kampar	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93	69,38
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15
Kepulauan Meranti	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50
Pekanbaru	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35	81,32
Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40

ota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti pada Tabel 2 di atas maupun Grafik 1 Pada tahun 2020 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 74,40 ; 72,71 ; 71,92





## b. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan criteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolute adalah ukuran angka atau hitungan perkepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2015-2020 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 3  
Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kota Dumai</b>							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16
<b>Provinsi Riau</b>							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	399.211	426.001	456.493	479.944	528.468	546.090
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72	483,39
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82
<b>Indonesia</b>							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	333.034	350.420	370.910	392.154	392.154	437.902
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.674,58	27.550,00
Persentase penduduk miskin	(%)	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

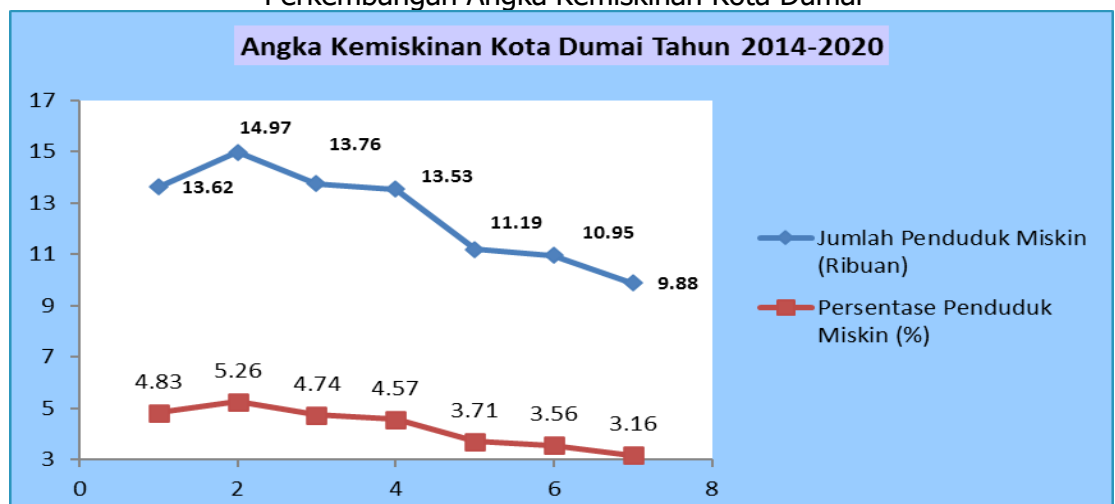
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)





Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 5,26%, kemudia mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 5,26% menjadi 3,16% di tahun 2020. Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan di tahun 2015 ini diindikasikan disebabkan oleh tingginya persentase penduduk miskin di daerah *hinterland*, baik terhadap 12 kab/kota lainnya di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga (Sumatera Utara 10.53% dan Jambi 8.86% ). Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai menjadi daya tarik bagi penduduk miskin di daerah *hinterland* untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.

Grafik. 2  
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai



(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Untuk indek kedalaman kemiskinan Kota Dumai pada tahun 2013-2020 dapat dilihat pada table dan Grafik berikut ini :



Tabel. 4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
Kota Dumai Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)

Grafik. 3  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020



(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa trend indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman terendah selama kurun waktu 2013-2020 terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,38, kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan namun kemudian membaik kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,28, dan kemudian turun pada tahun 2020 sebesar 0,31. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode trend indeks keparahan kemiskinan, selama kurun waktu 2013-2020, indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,06 kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat namun kemudian membaik pada tahun 2020 menjadi 0,05.



### c. Angka pengangguran

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Kondisi Kota Dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Se-  
Provinsi Riau Tahun 2016-2020(persen)

Kabupaten/Kota	TPT (persen)				
	Unemployment Rate (percent)				
(1) Kabupaten	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)
1 Kuantan Singingi	-	6,50	5,79	4,82	5,21
2 Indragiri Hulu	-	4,73	4,53	4,79	4,91
3 Indragiri Hilir	-	4,08	3,96	4,55	4,35
4 Pelalawan	-	3,55	5,12	4,67	5,99
5 Siak	-	5,60	4,06	4,13	5,80
6 Kampar	-	5,93	5,19	5,65	6,15
7 Rokan Hulu	-	6,17	5,23	4,51	4,42
8 Bengkalis	-	8,62	9,76	9,28	9,31
9 Rokan Hilir	-	4,59	5,82	4,79	4,80
10 Kepulauan Meranti	-	4,54	6,47	5,93	7,94
<b>Kota</b>					
1 Pekanbaru	-	8,91	8,11	7,74	8,56
2 Dumai	-	8,94	5,87	6,30	8,19
<b>7,43</b>	<b>6,22</b>	<b>6,20</b>	<b>5,98</b>	<b>5,76</b>	<b>6,32</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/BPS-Statistics Indonesia,

August National Labor Force Survey

### d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang mengGrafikkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang mengGrafikkan andil masing-masing sektor.



Bila kita lihat angka PDRB tahun 2019–2020 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 36.145,36 miliar rupiah pada tahun 2019 meningkat menjadi 36.322,88 miliar rupiah di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliarrupiah), 2016–2020**

Lapangan Usaha/Industry (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 687,64	1 806,63	1 875,18	1 923,18	2079,21
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	121,86	116,79	120,04	128,17	129,58
C Industri Pengolahan/Manufacturing	15 088,11	16 611,66	18 660,48	20 865,62	21783,30
D Pengadaan Listrik dan G s/ Electricity and Gas	24,52	27,10	28,10	31,77	73,72
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,29	4,74	4,88	5,33	5,60
F Konstruksi/Construction	3 214,66	3 533,02	3 786,76	4 049,17	3941,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5 000,29	5 250,80	5 413,96	5 736,85	5257,96
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	862,15	918,54	973,79	1 055,63	726,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food	260,52	280,82	303,73	319,62	258,81
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	294,25	333,68	380,26	418,39	457,24
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	367,27	375,46	390,06	397,14	409,21
L Real Estat/Real Estate Activities	134,71	143,28	153,05	161,68	164,04
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	1,55	1,66	1,84	2,06	1,63
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	541,62	553,24	568,68	587,76	590,24
P Jasa Pendidikan/Education	149,35	155,05	161,94	177,13	185,34



PEMKO DUMAI

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	49,79	53,47	56,82	65,84	77,38
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	159,68	176,90	196,64	220,03	181,04
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>27 962,26</b>	<b>30 342,84</b>	<b>33 076,21</b>	<b>36 145,36</b>	<b>36322,88</b>

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 24.855,82 Miliar rupiah pada tahun 2019 menurun menjadi 24.595,61miliar rupiah pada tahun 2020. Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar -1,05 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 7  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2016–2020

	Lapangan Usaha/Industry (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,14	3,31	2,77	1,99	4,18
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,04	-4,95	-3,75	2,30	-1,30
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,71	5,17	7,51	7,17	3,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	18,12	1,04	3,21	7,29	138,28
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D ur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	-0,16	4,60	1,13	6,24	3,90
F	Konstruksi/Construction	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,16	2,84	1,91	2,89	-10,32
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	3,02	4,82	3,85	5,35	-34,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food	2,58	6,30	6,46	3,79	-20,01
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24



K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,51	-0,74	2,09	0,12	3,44
L	Real Estat/Real Estate Activities Jasa Perusahaan/Business	1,41	3,43	3,89	5,34	1,65
M,N	Activities	3,61	6,91	9,07	7,74	-22,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,16	0,11	0,28	2,33	-2,16
P	Jasa Pendidikan/Education	0,55	2,70	3,94	5,62	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>		<b>2,03</b>	<b>4,14</b>	<b>4,46</b>	<b>5,35</b>	<b>-1,05</b>

Indeks implisit di Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 147,68 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 47,68 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada tahun 2020 sebesar 1,55 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 1,55 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya dimana sektor transportasi dan perdagangan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 5,35 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 8  
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut  
Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	146,47	151,77	153,29	154,14	159,96
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	145,27	146,48	156,62	163,26	167,23
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	125,40	131,27	137,16	143,11	145,04
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	143,34	156,75	157,52	165,96	161,64
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D ur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and	122,03	128,83	131,02	134,75	136,43



	Remediation Activities					
F	Konstruksi/Construction	147,19	153,56	160,45	164,73	165,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	129,62	132,36	133,91	137,92	140,96
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	138,85	141,12	144,07	148,24	156,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	169,10	171,47	174,21	176,73	178,80
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	115,01	122,75	132,27	135,75	135,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	137,61	141,73	144,23	146,68	146,11
L	Real Estat/Real Estate Activities	140,16	144,13	148,31	148,87	148,59
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	145,41	145,43	147,95	153,12	155,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	125,76	128,32	131,52	132,85	136,35
P	Jasa Pendidikan/Education	156,95	158,66	159,43	165,11	170,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	152,79	155,54	156,56	163,71	167,85
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	148,69	152,54	156,13	160,59	165,23
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>130,72</b>	<b>135,79</b>	<b>140,52</b>	<b>145,42</b>	<b>147,68</b>

Tabel. 9  
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2016–2020

	Lapangan Usaha/Industry (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	7,57	3,62	1,00	0,56	3,78
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,42	0,83	6,79	4,37	2,43
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	5,38	4,68	4,49	4,34	1,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas Pengadaan Air; Pengelolaan	15,17	9,36	0,49	5,36	-2,60





E	Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6,32	5,57	1,70	2,84	1,25
F	Konstruksi/Construction	8,72	4,33	4,49	2,67	0,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,33	2,11	1,18	2,99	2,20
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	3,61	1,64	2,09	2,89	5,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food	8,04	1,40	1,60	1,39	1,23
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,38	6,73	7,76	2,63	0,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,93	2,99	1,77	1,70	-0,39
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,41	2,83	2,90	0,38	-019
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,76	0,02	1,73	3,49	1,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,07	2,04	2,50	1,01	2,64
P	Jasa Pendidikan/Education	3,88	1,09	0,48	3,56	3,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,29	1,80	0,66	4,57	2,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	6,45	2,59	2,35	2,85	2,89
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>5,49</b>	<b>3,88</b>	<b>3,48</b>	<b>3,49</b>	<b>1,55</b>

#### e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu mengGrafikkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita



tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini tersaji Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 10.  
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	84.354,54	88.928,34	95.733,57	101.798,70	108.787,11	117.198,81	24.595.613,77
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	109.784,64	102.887,81	104.861,11	105.858,67	110.826,76	110.826,76	490.000.000
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	2,69	1,91	4,64	4,09	5,35	5,61	-1,05
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,71	0,22	2,18	2,68	2,37	2,00	-1,12
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

Tabel berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2013-2019



Tabel. 11  
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran  
diKota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita Makanan							
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559	608.839	
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64	47,52	53,12
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan							
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256	672.279	
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36	52,48	46,88
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815	1.281.118	12.453

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

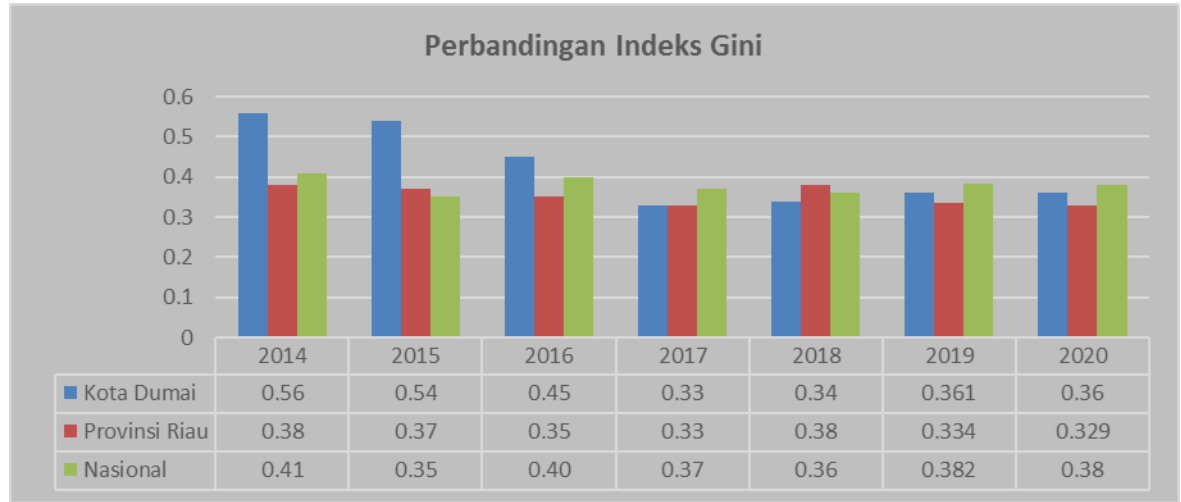
Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 927.230,- menjadi Rp. 1.281.118,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 50,96% pada tahun 2014 menjadi 47,52% di tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2014 menjadi 52,47% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

#### f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2014-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Grafik Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020.



Grafik Kurva.4  
Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020



Sumber: Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah

## 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada Urusan Wajib dibagi atas Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkat Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan
2. kesehatan
3. pekerjaan umum dan penataan ruang
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. sosial

Dalam pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2021berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021.



PEMKO DUMAI

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021.



## 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

### a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi Negeri/swasta	<i>Sudahcukupjelas</i>	80	DISDIK	
		2	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yg menerima pelengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		3	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	142	DISDIK	
		4	Jumlah kebutuhan kebutuhan minimal pendidik PAUD Negeri/sawsta	<i>sda</i>	25	DISDIK	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri/swasta)	<i>sda</i>	332	DISDIK	
		6	Jumlahpendidik PAUD(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV / S.1 bidangpendidikananakusidini, pendidikan lain / psikologi dan sertifikatprofesi guru pendidikananakusidini	<i>sda</i>	61		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD(Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	<i>sda</i>	31	DISDIK	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	109	DISDIK	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>Sda</i>	-	DISDIK	
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	<i>sda</i>	-	DISDIK	



		dari Pemerintah Daerah				
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.908	DISDIK	
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.200	DISDIK	
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	48	DISDIK	
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	12	DISDIK	
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.105	DISDIK	
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	889	DISDIK	
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	<b>1</b>	DISDIK	
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	1	DISDIK	
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	433	DISDIK	
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	313	DISDIK	
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	911	DISDIK	
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	391	DISDIK	
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	<i>sda</i>	78	DISDIK	





		kepala sekolah				
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	33	DISDIK	
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	<b>176</b>	DISDIK	
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	<b>132</b>	DISDIK	
	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	109	DISDIK	
	28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.908	DISDIK	
	31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.200	DISDIK	
	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	48	DISDIK	
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	12	DISDIK	
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.105	DISDIK	
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	889	DISDIK	
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	1	DISDIK	
	37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	1	DISDIK	



PEMKO DUMAI

	38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	433	DISDIK	
	39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	313	DISDIK	
	40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	911	DISDIK	
	41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	391	DISDIK	
	42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	78	DISDIK	
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	33	DISDIK	
	44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	176	DISDIK	
	45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	132	DISDIK	
	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan swasta)	<i>sda</i>	10	DISDIK	
	47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan	<i>sda</i>	-	DISDIK	



PEMKO DUMAI

			Swasta)					
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	22	DISDIK		
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	<i>sda</i>	27	DISDIK		
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	78	DISDIK		
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	<i>sda</i>	8	DISDIK		
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	<i>sda</i>	1	RSUD		
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<i>sda</i>	2	RSUD		
		3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8253	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	<i>sda</i>	549	Diskes	
		4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8119	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<i>sda</i>	549	Diskes	
		5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	4195	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<i>sda</i>	549	Diskes	



PEMKO DUMAI

	6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	19543	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>sda</i>	549	Diskes	
	7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	23272	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<i>sda</i>	1790	Diskes	
	8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	113054	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	1790	Diskes	
	9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9819	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	1790	Diskes	
	10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	338640	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
	11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	539120	Diskes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
	12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	79470	Diskes	
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes		
13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan	<i>sda</i>	428	Diskes		



PEMKO DUMAI

			yang tersedia				
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
		14	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	293	Diskes	
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
3	PU dan PR	1	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			5 Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
			6 Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah</i>	563.6 M	PUPR	
		2	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	<i>Sudahcukupjelas</i>	-	PUPR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kabupaten/Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg	<i>sda</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)				
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah</i>	-	PUPR	
	3	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	<i>Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)</i>	-	PUPR PUPR	
				<i>Panjang jaringan irigasi primer (m) X 100%</i>			
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	<i>Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)</i>	-	PUPR PUPR	
				<i>Panjang jaringan irigasi sekunder (m) X 100%</i>			
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	<i>Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)</i>	-	PUPR	
				<i>Panjang jaringan irigasi tersier (m) X 100%</i>			
	4	1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	<i>Ada/tdk</i>	1 Dok	PUPR	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	Tidak	PUPR	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	<i>Sudah cukup jelas</i>	1	PUPR	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	<i>Sda</i>	1	PUPR	



PEMKO DUMAI

		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	<i>Sda</i>		3	PUPR	
	5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	<i>Sda</i>		-	PUPR	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki seftik}}{\text{Rumah diwilayah pengembangan spald dg kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25} \times 100 \%$		-	PUPR	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\sum$ rumah yg lumpur tinjanya yg telah diolah di IPLT		-	PUPR	





				Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pd wilayah terbangun > 25 $\Sigma$ Jiwa/ha				
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbah yang diolah di IPALD $\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALD T sda $\times 100\%$		-	PUPR	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat $\times 100\%$ $\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		-	PUPR	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia $\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota $\times 100\%$		-	PUPR	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia $\times 100\%$		-	PUPR	



PEMKO DUMAI

				<i>Σjumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota</i>				
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		<i>Σjumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPA LD x100%</i> <i>jumlah rumah yang dilayani Σ dengan SPALD – T pada kab/kota</i>		-	PUPR	
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		<i>Σjumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot x100%</i> <i>Σjumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD – S</i>		-	PUPR	
6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi		<i>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku</i> <i>Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)</i>		-	PUPR	
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dala tahun eksisting		<i>Sudah cukup jelas</i>		-	PUPR	
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		<i>Ada/tdk</i>		-	PUPR	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli		<i>Ada/tdk</i>		-	PUPR	



		Bangunan/Gedung			
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	<i>Sudahcukupjelas</i>	-	PUPR
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	<i>sda</i>	-	PUPR
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/ kota yang dipelihara/dirawat	<i>sda</i>	-	PUPR
7	1	Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan Kab/Kota	<i>Sudahcukupjelas</i>	1198.243 KM	PUPR
	2	Dokumenrencanaindukpengembanganjaringanjalankota		-	
	3	Panjang jalan yang dibangun	<i>Sudahcukupjelas</i>	6,887 KM	PUPR
	4	Panjang jembatan yang dibangun	<i>sda</i>	185 Unit	PUPR
	5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	<i>sda</i>	0	PUPR
	6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	<i>sda</i>	0	PUPR
	7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	<i>sda</i>	2,930 KM	PUPR
	8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	<i>sda</i>	37 Unit	PUPR
	9	Panjang jalan yang dipelihara	<i>sda</i>	40 ruas	PUPR
	10	Panjang jembatan yang dipelihara	<i>sda</i>	-	PUPR
8	1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>Sudahcukupjelas</i>	-	PUPR
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data teremutakhir	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang	<i>sda</i>	-	PUPR



		bersumber dari APBD Kab/Kota				
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	<i>sda</i>	-	PUPR	
		7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	<i>sda</i>		PUPR	
		9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	<i>sda</i>	-	PUPR	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	<i>sda</i>	-	PUPR	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan	<i>sda</i>	-	PUPR	



			komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>		PUPR
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian	<i>sda</i>		PUPR



PEMKO DUMAI

				jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	-	-		
4	Perumahan Rakyat	1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	<i>Sudahcukupjelas sda</i>	-	Perkim	
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	<i>sda</i>	-	Perkim	
			3	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korbanyang rumahnya terkena bencana alam		-	Perkim	
			4	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi	<i>sda</i>	-	Perkim	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	-	Perkim	
			6	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	-	Perkim	
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana	<i>sda</i>	-	Perkim	
			8	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang tergasilitasi	<i>sda</i>	-	Perkim	
			9	Jumlah, luasan dan lokasi percadangan lahan	<i>sda</i>	-	Perkim	
		2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>Sudahcukupjelas</i>	-	Perkim	
			2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	-	Perkim	
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	-	Perkim	
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	-	Perkim	



PEMKO DUMAI

		5	Jumlahrumahtangga penerimalayanan yang belummendapatkan penyediaanrumahlayak huniberdasarkanrencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	-	Perkim	
		7	Jumlah total luasan (Ha) pengadaantanah	<i>sda</i>	-	Perkim	
	3	1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	<i>Sudahcukupjelas</i>	35,35 Ha	Perkim	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	<i>sda</i>	135	Perkim	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	<i>sda</i>	127,6 Ha	Perkim	
	4	1	Jumlahrumah di kab/kota	<i>Sudahcukupjelas</i>	48.888	Perkim	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	<i>sda</i>	135	Perkim	
		3	Jumlahrumahtidak layakhuni	<i>sda</i>	9.739	Perkim	
		4	Jumlahrumah yang tidakdihuni	<i>sda</i>	-	Perkim	
		5	Rasiorumah dan KK	<i>Jumlah KK</i> <i>Jumlah total unit rumah x 100%</i>	193,17%	Perkim	
		6	Jumlahrumah pembangunanbaru	<i>sda</i>	0	Perkim	
	5	1	Jumlahperumahan yang terfasilitasi PSU	<i>Sudahcukupjelas</i>	-	Perkim	
		2	Jumlah unit rumah yang sudahdifasilitasi air minum	<i>sda</i>	-	Perkim	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasijalan lingkungan	<i>sda</i>	-	Perkim	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasiaksesanitasi (on site / off site)	<i>sda</i>	250	Perkim	





PEMKO DUMAI

		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	<i>sda</i>	-	Perkim		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	<i>sda</i>	-	Perkim		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	<i>sda</i>	25	Perkim		
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	<i>sda</i>	25	Perkim		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	<i>sda</i>	-	Perkim		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	<i>Sudah cukup jelas</i>	59	SATPOL PP	
			2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	<i>sda</i>	-	SATPOL PP	
			3	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi	<i>sda</i>	15 Unit	SATPOL PP	
			4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	<i>sda</i>	8 Perda	SATPOL PP	
			5	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	<i>Ada/tdk</i>	1 orang	SATPOL PP	
			6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	<i>sda</i>	7 SOP	SATPOL PP	
		2	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD
					<i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>			
		2	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	$\frac{120}{9.818}$	1,22%	BPBD
					<i>Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>			
		3	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yan</i>	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD



			dinyatakan sah/legal	<i>g disusun</i>	0			
				<i>Jumlahsatudokumen RPB yang lengkap dan sudahdisahkan</i>				
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuanpekerjaandokumen yang disusun</i>	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
				<i>Jumlahsatudokumenrenkon yang lengkap dan sudahdisahkan</i>				
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>jumlahaparatur dan warga negara yang ikutpelathan</i>	$\frac{120}{120}$	100%	BPBD	
				<i>jumlahaparaturdenganwarga negara di kawasanrawanbencana</i>				
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>jumlahwarga negara yang ikutpelatihan</i>	$\frac{120}{120}$	100%	BPBD	
				<i>jumlahwarga negara yang berada di kawasanrawanbencana</i>				
		5	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>jumlahwarga negara yang mendapatlayananpusdalops</i>	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
				<i>jumlahwarga negara yang berada di kawasanrawanbencana</i>				
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>jumlahwarga negara yang mendapatlayananperalatanperlindungan</i>	$\frac{120}{120}$	100%	BPBD	
				<i>jumlahwarga negara yang berada di kawasanrawanbencana</i>				
	4	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap statusKLB	<i>jumlahkecepatanresponkurangdari 24 jam untuksetiappenetapan KLB</i>	$\frac{1}{1}$	100%	BPBD	
				<i>jumlahseluruhpenetapan status KLB</i>				
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>jumlahkecepatanresponkurangdari 24 jam</i>	$\frac{1}{1}$	100%	BPBD	



				<i>untuk setiap penetapan darurat bencana</i>				
				<i>jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i>				
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana</i>	<u>58</u> 58	100%	BPBD	
				<i>jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i>				
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i>	<u>4.384</u> 4.825	90,86%	BPBD	
				<i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i>				
	5	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	<i>Sudah cukup jelas</i>		67	BPBD	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	<i>Ada/tidak</i>		Tidak	BPBD	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	<i>Dibuat dalam bentuk daftar</i>		-	BPBD	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	<i>Dibuat dalam bentuk daftar</i>		0	BPBD	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<i>Sudah cukup jelas</i>		35	BPBD	



PEMKO DUMAI

			6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	12	BPBD	
			7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	12	BPBD	
			8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	20	BPBD	
6	Sosial	1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	494	DINAS SOSIAL	
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<i>sda</i>	95	DINAS SOSIAL	
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	<i>sda</i>	5	DINAS SOSIAL	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<i>sda</i>	494	DINAS SOSIAL	
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemukiman sesuai standar gizi	<i>sda</i>	456	DINAS SOSIAL	
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	456	DINAS SOSIAL	
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<i>sda</i>	106	DINAS SOSIAL	



		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<i>sda</i>	126	DINAS SOSIAL	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<i>sda</i>	33	DINAS SOSIAL	
	2	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	<i>sda</i>	48	DINAS SOSIAL	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<i>sda</i>	9	DINAS SOSIAL	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<i>sda</i>	19	DINAS SOSIAL	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<i>sda</i>	16	DINAS SOSIAL	
	3	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan	<i>sda</i>	1258	DINAS	



PEMKO DUMAI

			makanan			SOSIAL	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	1258	DINAS SOSIAL	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	<i>sda</i>	-	DINAS SOSIAL	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	<i>Ada/tidak</i>	-	DINAS SOSIAL	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	<i>sda</i>	126	DINAS SOSIAL	



b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(3.222/13.817) x 100%	23,31%	DISDIK	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(35.260/36.989) x 100%	95,326%	DISDIK	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(11.160/15.379) x 100%	72,566%	DISDIK	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(274/69.368) x 100%	0,395%	DISDIK	
			Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	(33/33) x 100%	100%	DISDIK	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung rumah sakit	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk dikabupaten/kota}}$	$\frac{321}{323.090}$	0,09 %	RSUD	



	2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	<i>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</i>	$\frac{2}{4}$	50 %	RSUD	
			<i>Jumlah RS dikabupaten/kota x 100%</i>				
	3	persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>umlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	$(8133 / 9187) \times 100$	88,53 %	DISKES	
			<i>Jumlah ibu hamil dikabupaten/kota x 100%</i>				
	4	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>	$(8118 / 8770) \times 100$	92,57 %	DISKES	
			<i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100%</i>				
	5	persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<i>umlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(7589 / 8352) \times 100$	90,86%	DISKES	
			<i>Jumlah bayi baru lahir dikabupaten/kota x 100%</i>				
	6	cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(14509 / 34694) \times 100$	41,82 %	DISKES	
<i>Jumlah balita dikabupaten/kota x 100%</i>							
7	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	$(23272 / 48158) \times 100$	48,32%	DISKES		
		<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar dikabupaten/kota x 100%</i>					
8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skining kesehatan sesuai standar	<i>orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	$(113054 / 200516) \times 100$	56,38%	DISKES		
		<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota x 100%</i>					
9	persentase warha negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	$(9819 / 14713) \times 100$	66,74%	DISKES		
		<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas dikabupaten/kota x 100%</i>					





		10	persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(12533 / 69518) x 100	18,03 %	DISKES	
		11	persentase penderita DM yang mendapatkkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(3703 / 3659) x 100	101,20 %	DISKES	
		12	persentase ODGJ berat yang mendapatkkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(426/ 482) x 100	88,38 %	DISKES	
		13	persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{umlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(4551/ 7641) x 100	59,56 %	DISKES	
		14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(4936/12 183) x 100	40,52%	DISKES	
3	PU dan PR	7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100$		0	Dinas PUPR	
		8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di}}$		0	Dinas PUPR	



PEMKO DUMAI

			$\frac{WS \text{ Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)} \times 10}$				
	9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota} \times 100\%}$		0	Dinas PUPR	
	10	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut} \times 100\%}$	$\frac{65.974}{96.000}$	68,72%	Dinas PUPR	
	11	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota} \times 100\%}$		0	Dinas PUPR	
	12	Rasiokepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku} \times 100\%}$	$\frac{146}{146}$	100%	Dinas PUPR	
	13	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota} \times 100\%}$	$\frac{869,96}{1.198,243}$	72,60%	Dinas PUPR	



		14	Rasiotenaga operator/teknisi/analisis yang memilikisertifikat kompetensi	<p><i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i></p> <p><i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i></p>	0		Dinas PUPR	
		15	rasioprojek yang menjadikewenanganpengawasannyatanpakecelakaan konstruksi	<p><i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i></p> <p><i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%</i></p>	0 201	0	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Peyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<p><i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i></p> <p><i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%</i></p>	0 0	0	Dinas Perkim	
		15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi progam pemerintah kabupaten/kota	<p><i>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i></p> <p><i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%</i></p>	0 0	0	Dinas Perkim	
		16	Persentasi kawasan kumuh 10 – 15 Ha di kab/kota yang ditangani	<p><i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i></p> <p><i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%</i></p>	127,6 127,6	100%	Dinas Perkim	
		17	Berkurangnya jumlah unit RTLH	<p><i>Jumlah unit rumah tidak layak huni</i></p> <p><i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%</i></p>	9.739 48.888	19,9%	Dinas Perkim	
		18	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	<p><i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i></p>	0	0	Dinas	



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah unit rumah kab/kota x 100%</i>	48.888		Perkim	
5	Trantibum dan Linmas	18	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{59}{59}$	100%	Satpol PP	
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{8}{8}$	100%	Satpol PP	
		20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sudah jelas		300	BPBD	
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sudah jelas		300	BPBD	
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sudah jelas		300	BPBD	
		23	Persentase jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>		$\frac{24}{29}$	82,76%	BPBD



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%</i>				
		24	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Sudah jelas		15 Menit	BPBD	
6	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	494/494 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
				<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%</i>				
		24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i>	1258/1258 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
				<i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x 100%</i>				



### **3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.**

Hasil evaluasi dari tim evaluasi BPKP Propinsi Riau, diperoleh dari penilaian indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, Pemerintah Kota Dumai memperoleh skor 3.0291 dengan status kinerja berprestasi **Sangat Tinggi** dan mendapatkan peringkat ke **5 (lima)** dari 12 Kabupaten/Kota se Propinsi Riau pada tahun 2019, dan untuk tingkat Nasional memperoleh predikat dengan skor 2,9541 dan **status kinerja tinggi**. sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 masih menunggu hasil dari tim evaluasi Propinsi Riau dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 April 2021 Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Riau (BPK-RI) mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2020 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

### **4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah**

#### **a. Target Dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp 1.296.269.073.350,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 374.465.303.311,00,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 880.924.310.039,00,-
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 40.879.460.000,00,-



*Tabel 12.* Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021  
Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2021 dan Perwako No. 49 Tahun 2021

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>374.465.303.311,00</b>
	Pajak Daerah	177.480.200.000,00
	Retribusi Daerah	40.111.180.100,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.414.194.590,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.459.728.621,00
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>880.924.310.039,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	772.049.363.425,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.874.946.614,00
<b>C.</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>40.879.460.000,00</b>
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.879.460.000,00
	<b>Jumlah .....</b>	<b>1.296.269.073.350,00</b>

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah 2021

Adapun rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

*Tabel 13.* Target dan Realisasi Pendapatan  
Kota Dumai Tahun 2021

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2021	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.296.269.073.350,00</b>	<b>1.287.005.084.625,14</b>	<b>99,29%</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>374.465.303.311,00</b>	<b>366.696.884.199,75</b>	<b>97,93%</b>
<b>A</b>	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>177.480.200.000,00</b>	<b>185.979.625.987,00</b>	<b>104,79%</b>
<b>B</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>39.981.180.100,00</b>	<b>23.776.863.396,46</b>	<b>59,47%</b>
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>177.480.200.000,00</b>	<b>185.979.625.987,00</b>	<b>104,79%</b>
-	Pajak Hotel	4.547.815.532,00	4.361.663.283,00	95,91%
-	Pajak Restoran	7.743.000.000,00	9.048.442.070,00	116,86%
-	Pajak Hiburan	760.760.000,00	798.429.705,00	104,95%
-	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	2.564.739.618,00	106,86%
-	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	8.000.000.000,00	12.588.339.273,00	157,35%
-	Pajak Penerangan Jalan PLN	35.400.000.000,00	36.872.627.693,00	104,16%
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.806.700.000,00	0,00	0%
-	Pajak Parkir	728.747.468,00	696.543.612,00	95,58%



No.	URAIAN	TARGET APBD P 2021	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
-	Pajak Air Tanah	877.977.000,00	1.092.931.785,00	124,48%
-	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	91.147.560,00	79,12%
-	PBB	96.500.000.000,00	97.362.170.939,00	100,89%
-	BPHTB	18.600.000.000,00	20.502.590.449,00	110,23%
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>39.981.180.100,00</b>	<b>23.776.863.396,46</b>	<b>59,47%</b>
-	Retribusi Jasa Umum	3.652.150.500,00	2.119.372.650,00	58,03%
-	Retribusi Jasa Usaha	23.329.029.600,00	18.300.235.746,46	78,44%
-	Ret. Perizinan Tertentu	13.000.000.000,00	3.357.255.000,00	25,83%
<b>C</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>1.414.194.590,00</b>	<b>1.415.125.255,00</b>	<b>100,07%</b>
-	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan)	1.316.194.590,00	1.316.194.590,00	100%
-	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)	98.000.000,00	98.930.665,00	100,95%
<b>D</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>155.589.728.621,00</b>	<b>155.525.269.561,29</b>	<b>99,96%</b>
-	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	5.000.000.000,00	2.432.359.773,03	48,65%
-	Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	143.500.500,00	517.422.366,00	360,57%
-	Hasil Kerjasama daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
-	Jasa Giro	3.200.000.000,00	4.697.811.210,09	146,81%
-	Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	1.135.241.649,19	87,33%
-	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain	4.988.896.330,00	6.898.667.314,88	138,28%
-	Pendapatan denda pajak daerah	4.151.147.084,00	618.882.522,00	14,91%
-	Pendapatan dari pengembalian	201.018.041,00	258.427.665,00	128,56%
-	Pendapatan BLUD	135.605.166.666,00	138.966.457.061,10	102,48%
<b>II.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>880.924.310.039,00</b>	<b>879.612.437.425,39</b>	<b>99,85%</b>
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>772.049.363.425,00</b>	<b>763.025.612.681,00</b>	<b>98,83%</b>
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>108.874.946.614,00</b>	<b>116.586.824.744,39</b>	<b>107,08%</b>
<b>III.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>40.879.460.000,00</b>	<b>40.695.763.000,00</b>	<b>99,55%</b>





No.	URAIAN	TARGET APBD P 2021	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	<b>YANG SAH</b>			
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55%
	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS	40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55%
	<b>Total Pendapatan</b> .....	<b>1.296.269.073.350,00</b>	<b>1.287.005.084.625,14</b>	<b>99,29%</b>

Sumber: Data Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Un Audited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, rinciannya adalah sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2021 Perubahan ditargetkan sebesar Rp 374.465.303.311,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 366.696.884.199,75,- atau 97,93% dari target semula. Adapun rincian PAD adalah sebagai berikut :

#### a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 177.480.200.000,- terealisasi sebesar Rp 185.979.625.987,- atau 104,79% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 4.547.815.532,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 4.361.663.283,00,- atau 95,61% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah adanya penambahan objek Pajak Hotel yang baru dan tingkat penerimaan omset hotel meningkat.
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 7.743.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 9.048.442.070,00,- atau 116,86% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset restoran meningkat.



3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 760.760.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 798.429.705,00,- atau 104,95% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini karena naiknya penerimaan omset Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 2.400.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.564.739.618,00,- atau 106,86% dari target semula, hal ini disebabkan meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
5. Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 35.400.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 36.872.627.693,00,- atau 104,16% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN.
6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp 8.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 12.588.339.273,00,- atau 157,35% dari target semula. Faktor pendukung tercapainya target penerimaan ini karena meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik Non PLN oleh Perusahaan.
7. Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp 877.977.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.092.931.785,00,- atau 124,48% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan air tanah ini disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 1.806.700.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 0,00,- atau 0,00% dari target semula.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 96.500.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 97.362.170.939,00,- atau 100,89% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya



pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 18.600.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 20.502.590.449,00,- atau 110,23% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena peningkatan transaksi jual beli tanah di Tahun 2021 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak.
  11. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 728.747.468,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 696.543.612,00,- atau 95,58% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak parkir, karena terlaksananya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir secara optimal.
  12. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 91.147.560,00,- atau 79,12% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena kendala izin usaha, sehingga tidak bisa melakukan pungutan pajak sarang burung walet.
- b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 39.981.180.100,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 23.776.863.396,46,- atau 59,47% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 3.652.150.500,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.119.372.650,00,- atau 59,47%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapai target adalah sebagai berikut:



- a) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 144.779.000,00,- atau 14,48% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:
- Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
- b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 826.800.500,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 71.080.550,00,- atau 8,60% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan adalah disebabkan:
- Masyarakat luas belum memiliki kesadaran untuk melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.
  - Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
  - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit, seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.
  - Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
  - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik, sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
- c) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 775.275.000,- atau 103,37% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan disebabkan



terlaksananya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

d) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi ditargetkan sebesar Rp 183.750.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 203.602.000,00,- atau 110,80% dari target semula.

2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp. 23.329.029.600,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 18.300.235.746,46,- atau 78,44%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 38.250.000,00,- atau 76,50%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Ruangannya dengan realisasi pencapaian tahun 2021 sebesar Rp 38.250.000,00,-

b) Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp 74.722.500,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 106.910.000,00,- atau 143,08% dari target semula. Retribusi Terminal ini meliputi:

- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha target sebesar Rp 74.722.500,00,- dan realisasi sebesar Rp 106.910.000,00,- atau 143,08%.

c) Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 22.869.827.100,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.090.824.546,46,- atau 79,10% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena:

- Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, karena tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, belum mencapai target. Faktor penghambat tidak tercapainya target dikarenakan wabah pandemi Covid-19.



- d) Retribusi Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 24.480.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 24.680.000,- atau 100,82% dari target semula.
- e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 285.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 31.686.200,00,- atau 11,12% dari target semula.
- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 7.885.000,- atau 31,54% dari target semula.
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 7.885.000,- atau 31,54% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim, sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil dan Pengadaan Pakan Ikan untuk induk ikan masih belum memenuhi standar yang baik untuk menghasilkan bibit ikan yang baik dan berkualitas.
3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 13.000.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.357.255.000,- atau 25,83%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
- a. Tidak Tercapainya target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 12.990.050.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 3.348.255.000,- atau 25,78% dari target semula.
- b. Tidak tercapainya target Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,- realisasi pencapaiannya Rp 9.000.000,- atau sebesar 90,45%.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.414.194.590,00,- dan realisasi



pencapaian sebesar Rp. 1.415.125.255,00,- atau 100,07% dari target semula. Rincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :

1. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp. 1.316.194.590,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.316.194.590,00,- atau 100% dari target semula.
  2. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp. 98.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar 98.930.665,00,- atau 100,95% dari target semula.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 155.589.728.621,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 155.525.269.561,29 atau 99,96% dari target semula.

## **2. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 880.924.310.039,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 879.612.437.425,39,- atau 99,85% pada Pendapatan Daerah tahun 2021. Penerimaan ini terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 137.308.463.620,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 145.468.956.587,- atau 105,94% dari target semula. Dana ini terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp 62.673.426.709,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 61.856.297.144,- atau 98,69% dari target semula.
  2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp. 74.635.036.911,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 83.612.659.443,- atau 112,02% dari target semula.



b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp. 429.427.931.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 429.427.931.000,- atau 100,00% dari target semula.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp. 173.709.723.805,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 156.525.480.094,- atau 90,10% dari target semula.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp. 31.603.245.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 31.603.245.000,- atau 100% dari target semula.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 40.879.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.695.763.000,- atau 99,55%. Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 40.879.460.000,- dan realisasi sebesar Rp 40.695.763.000,- atau 99,55%.

**b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, Modal dan tak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.454.362.356.872,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.289.659.257,23 atau 90,37%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.





*Tabel 14.*  
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>BELANJA</b>	1.454.362.356.872,00	1.314.289.659.257,23	(140.072.697.614,77)	90,37%
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.208.461.786.509,00	1.105.414.852.748,84	(103.046.933.760,16)	91,47%
Belanja Pegawai	640.785.007.944,00	587.860.841.072,00	(52.924.166.872,00)	91,74%
Belanja Barang dan Jasa	528.591.009.121,00	481.698.811.775,84	(46.892.197.345,16)	91,13%
Belanja Hibah	39.085.769.444,00	35.855.199.901,00	(3.230.569.543,00)	91,73%
<b>BELANJA MODAL</b>	234.465.493.304,00	199.818.329.751,39	(34.647.163.552,61)	85,22%
Belanja Modal Tanah	19.418.340,00	17.000.000,00	(2.418.340,00)	87,55%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.935.417.395,00	84.487.469.177,00	(20.447.948.218,00)	80,51%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.160.640.419,00	52.685.031.521,31	(4.475.608.897,69)	92,17%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	62.768.399.633,00	56.397.085.845,08	(6.371.313.787,92)	89,85%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.581.617.517,00	6.231.743.208,00	(3.349.874.309,00)	65,04%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	(2.378.600.302,00)	79,20%
Belanja Tidak Terduga	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	(2.378.600.302,00)	79,20%

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Data Un Audit (per 31/12/2021) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, BPKAD Kota Dumai

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2021 tersebut terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.208.461.786.509,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.105.414.852.748,84 atau 91,47% yang dialokasikan melalui :



- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 640.785.007.944,00 dengan realisasi sebesar Rp. 587.860.841.072,00 atau 91,74%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 528.591.009.121,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.698.811.775,84 atau 91,13%.
- c) Belanja Hibah sebesar Rp. 39.085.769.444,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.855.199.901,00 atau 91,73%.

## 2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 234.465.493.304,00 dengan realisasi sebesar Rp. 199.818.329.751,39 atau 85,22% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 19.418.340,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.000.000,00 atau 87,55%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 104.935.417.395,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.487.469.177,00 atau 80,51%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 57.160.640.419,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.685.031.521,31 atau 92,17%.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 62.768.399.633,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.397.085.845,08 atau 89,85%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 9.581.617.517,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.231.743.208,00 atau 65,04%

## 3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.435.077.059,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.056.476.757,00 atau 79,20% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 11.435.077.059,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.056.476.757,00 atau 79,20%



## 5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

### a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp 1.296.269.073.350,00,- realisasi sebesar Rp 1.287.005.084.625,14,- tingkat capaian 99,29%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 374.465.303.311,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 366.696.884.199,75,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 880.924.310.039,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 879.612.437.425,39,-
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 40.879.460.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.695.763.000,00,-

Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2021	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.296.269.073.350,00	1.287.005.084.625,14	99,29%
<b>I</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH	374.465.303.311,00	366.696.884.199,75	97,93%
<b>A</b>	Pajak Daerah	177.480.200.000,00	185.979.625.987,00	104,79%
<b>B</b>	Retribusi Daerah	39.981.180.100,00	23.776.863.396,46	59,47%
<b>C</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.414.194.590,00	1.415.125.255,00	100,07%
<b>D</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.589.728.621,00	155.525.269.561,29	99,96%
<b>II.</b>	PENDAPATAN TRANSFER	880.924.310.039,00	879.612.437.425,39	99,85%
<b>A.</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	772.049.363.425,00	763.025.612.681,00	98,83%



<b>B.</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.874.946.614,00	116.586.824.744,39	107,08%
<b>III.</b>	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166.515.356.364,00	128.860.440.208,00	77,39%
<b>A.</b>	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55%
	Total Pendapatan	1.296.269.073.350,00	1.287.005.084.625,14	99,29%

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.454.362.356.872,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.289.659.257,23 atau 90,37%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	1.454.362.356.872,00	1.314.289.659.257,23	(140.072.697.614,77)	90,37%
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.208.461.786.509,00	1.105.414.852.748,84	(103.046.933.760,16)	91,47%
Belanja Pegawai	640.785.007.944,00	587.860.841.072,00	(52.924.166.872,00)	91,74%
Belanja Barang dan Jasa	528.591.009.121,00	481.698.811.775,84	(46.892.197.345,16)	91,13%
Belanja Hibah	39.085.769.444,00	35.855.199.901,00	(3.230.569.543,00)	91,73%
<b>BELANJA MODAL</b>	234.465.493.304,00	199.818.329.751,39	(34.647.163.552,61)	85,22%
Belanja Modal Tanah	19.418.340,00	17.000.000,00	(2.418.340,00)	87,55%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.935.417.395,00	84.487.469.177,00	(20.447.948.218,00)	80,51%
Belanja Modal Gedung dan	57.160.640.419,00	52.685.031.521,31	(4.475.608.897,69)	92,17%



Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5
Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	62.768.399.633,00	56.397.085.845,08	(6.371.313.787,92)	89,85%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.581.617.517,00	6.231.743.208,00	(3.349.874.309,00)	65,04%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	(2.378.600.302,00)	79,20%
Belanja Tidak Terduga	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	(2.378.600.302,00)	79,20%

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2021 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.208.461.786.509,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.105.414.852.748,84 atau 91,47% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 640.785.007.944,00 dengan realisasi sebesar Rp. 587.860.841.072,00 atau 91,74%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 528.591.009.121,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.698.811.775,84 atau 91,13%.
- c) Belanja Hibah sebesar Rp. 39.085.769.444,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.855.199.901,00 atau 91,73%.

2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 234.465.493.304,00 dengan realisasi sebesar Rp. 199.818.329.751,39 atau 85,22% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 19.418.340,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.000.000,00 atau 87,55%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 104.935.417.395,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.487.469.177,00 atau 80,51%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 57.160.640.419,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.685.031.521,31 atau 92,17%.



- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 62.768.399.633,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.397.085.845,08 atau 89,85%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 9.581.617.517,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.231.743.208,00 atau 65,04%

3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.435.077.059,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.056.476.757,00 atau 79,20% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 11.435.077.059,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.056.476.757,00 atau 79,20%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 pada pasal 2 yaitu :

Tabel 17.  
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

PEMBIAYAAN	ANGGARAN
PEMBIAYAAN SEMULA	99.613.128.485,00
PEMBIAYAAN BERTAMBAH	95.868.181.488,00
JUMLAH PENDAPATAN SETELAH PERUBAHAN	195.481.309.973,00

**6. Inovasi Daerah**

I. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana



tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

## II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

**Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi
3. Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat
4. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
5. Menyediakan prasarana perhubungan yang memadai



6. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
7. Mewujudkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang aman dan nyaman untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa.
8. Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendalian banjir, dan Pengembangan jaringan Irigasi
9. Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian
10. Meningkatkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas.
11. Mengembangkan sistem drainase dan pengendalian banjir
12. Menambah jaringan listrik dipelosok dan Membangun Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
13. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
14. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
2. Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
3. Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
5. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
6. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
7. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
8. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
10. Meningkatkan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
11. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman





12. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik
13. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
14. Normalisasi sungai dan jaringan drainase
15. Meningkatkan luas daerah resapan air
16. Menyediakan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an
17. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
18. Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
19. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
20. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

**Misi Kedua :      Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Mengembangkan pendidikan PAUD
2. Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas pendidik
4. Meningkatkan kualitas lembaga/satuan pendidikan
5. Mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
6. Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif.



9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
10. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat secara merata
12. Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
13. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
14. Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
16. Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

1. Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
3. Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasinya
4. Mengembangkan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
5. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
6. Mengembangkan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan.
7. Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
8. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
10. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan
12. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan



13. Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial
16. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif
17. Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
18. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
19. Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
20. Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak
21. Meningkatkan sosialisasi manfaat keluarga berencana
22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
23. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

**Misi Ketiga :      **Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan****

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Penguatan koperasi dalam mendukung UMKM
2. Penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, networking, permodalan dan Daya saing produk
3. Memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut



1. Meningkatkan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM
2. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
3. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan
4. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar
5. Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai
6. Meningkatkan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral
7. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan
8. Meningkatkan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin
9. Memberdayakan kelompok usaha keluarga miskin
10. Mengembangkan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin
11. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar
12. Meningkatkan lifeskill keluarga miskin

**Misi Keempat : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2. Meningkatkan K3 melalui penegakan peraturan daerah
3. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatus yang berkarakter melayani
5. Mewujudkan manajemen pengelolaan arsip daerah secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara elektronik



7. Menata produk hukum daerah
8. Meningkatkan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi.
9. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
10. Mewujudkan keterpaduan data dan informasi pembangunan daerah
11. Pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel
13. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai
14. Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
15. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa
16. Peningkatan profesionalitas, kemampuan dan keahlian petugas linmas
17. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim penanganan kamtibmas dan konflik sosial
18. Membangun pos keamanan lingkungan yang sesuai standar
19. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim pemantauan orang asing dan lembaga masyarakat
20. Penguatan lembaga dan forum forum agama dan forum daerah
21. Peningkatan peran pemerintah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air
22. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan partai-partai politik

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan public
2. Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir
3. Memantapkan pelayanan publik yang prima.
4. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
5. Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.
6. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan



7. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan
9. Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai
10. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya
12. Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
13. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
14. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
15. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja
16. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
17. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
18. Menerapkan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
19. Peningkatan konektifitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
20. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
21. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan
22. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
23. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
24. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable



25. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
26. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
27. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
28. Meningkatkan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
29. Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat

**Misi Kelima: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Memperluas networking antar pelaku usaha agribisnis pertanian dan perikanan
2. Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian/ sektor perikanan (minapolitan) dengan pemanfaatan ruang kota untuk mengurangi land conversion
3. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan
4. Peningkatan reboisasi dan penghijauan serta perlindungan hutan
5. Mencegah dan menanggulangi penyakit hewan menular dan zoonosis.

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kelima adalah sebagai berikut

1. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil produksi
3. Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman
4. Ekstensifikasi/Intensifikasi pertanian dan sektor perikanan
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
6. Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
7. Memperkuat/meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suvey lance penyakit zoonosis.



8. Merehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

**Misi Keenam : Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa
2. Meningkatkan peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
4. Memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada investor
5. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keenam adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
2. Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangandan jasa
4. Memperluas networking pelaku usaha perdagan dan jasa
5. Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan kawasan industry
6. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
7. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
8. Penataan kawasan industri
9. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
10. Meningkatkan daya Saing Industri Kecil dan Menengah
11. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan





12. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
13. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
14. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
15. Mengintegrasikan Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
16. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja

**Misi Ketujuh : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan akses untuk informasi yang bernilai keagamaan dalam pembentukan karakter
2. peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
3. peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian
5. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketujuh adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
2. Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan
3. Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan



4. Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
5. Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
6. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya
7. Menyusun masterplan kepariwisataan
8. Pembenahan pusat informasi kepariwisataan dengan berbasis IT
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan
10. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
11. peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
12. Pembangunan Gedung Kepemudaan
13. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
14. Pembangunan GOR
15. Revitalisasi sarana olahraga
16. Peningkatkan pembinaan kepada organisasi keolahragaan



PEMKO DUMAI

## PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Didalam Laporan ini dijelaskan tentang informasi utama penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Publik dengan muatan informasi sebagai berikut yakni Capaian Kinerja Makro, capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar, hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dan Inovasi daerah

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2021 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses sebagaimana yang diharapkan.

Dumai, April 2022

**WALIKOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**